

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1 Infrastruktur Daerah

4.1.1.1 Infrastruktur Dasar

1. **Kualitas jalan terbangun masih rendah.** Prioritas pada jalan lingkar Simeulue yang merupakan jalan strategis nasional (Kolektor Primer), Dari panjang jalan \pm 344,74 km. baru teraspal sepanjang \pm 200,13 km (58,05 %) sedangkan sisanya masih lapisan timbunan pilihan. Hal ini mengakibatkan melambatnya arus distribusi penumpang dan barang.
2. **Masih rendahnya tingkat pelayanan air minum.** Hal ini diakibatkan masih terbatasnya sumber air serta dukungan infrastruktur jaringan air minum. Hingga tahun 2011 tingkat capaian pelayanan air minum baru mencapai 13,95 %.
3. **Masih banyaknya rumah penduduk Simeulue yang belum layak huni.** Hal ini diakibatkan oleh tingkat perekonomian masyarakat yang masih relatif rendah.
4. **Masih relatif rendahnya tingkat pelayanan persampahan, Hal ini** dikarenakan prasarana Tempat Pembuangan Akhir Sampah masih sistem open dumping serta armada kebersihan yang masih terbatas.

4.1.1.2 Infrastruktur Perhubungan

1. **Kondisi sarana dan prasarana perhubungan laut yang belum memadai.** Kabupaten Simeulue yang merupakan kepulauan terpisah dari daratan Aceh \pm 85 mill laut, menjadikan jalur perhubungan laut merupakan akses utama untuk menghubungkan wilayah Kabupaten Simeulue dengan Kabupaten lainnya. Jumlah arus barang maupun penumpang baik yang masuk maupun keluar Kabupaten Simeulue sangat tergantung dari jumlah trip pelayaran kapal penyeberangan (ferry) yang telah ditentukan. Saat ini sarana angkutan penyeberangan yang ada berupa 2 unit ferry yaitu KMP. Teluk Singkil yang melayari lintasan Sinabang - Labuhan Haji dan KMP Teluk Sinabang yang melayari lintasan Sinabang – Singkil. Pada saat salah satu KMP tersebut menjalani docking tahunan menyebabkan terhambatnya suplay dan terjadinya lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karenanya Kabupaten Simeulue sangat membutuhkan pelayaran tambahan guna mengantisipasi hal tersebut.

Selain dari pada itu bentuk pulau Simeulue yang memanjang dengan panjang ± 102 km yang hanya memiliki satu dermaga ferry dan satu dermaga cargo yang terletak di bagian Timur Simeulue, menjadi kurang efektif bagi masyarakat pengguna yang berada di bagian Barat Simeulue. Oleh karena itu memungkinkan untuk menambah fasilitas dermaga penyeberangan serta dermaga cargo yang berada di wilayah Simeulue bagian Barat dengan jalur lintasan Sibigo (Kabupaten Simeulue) – Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) agar penyebaran pembangunan dapat merata dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat di ujung Barat Kabupaten Simeulue.

2. **Masih terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan udara.** Kondisi geografis Kabupaten Simeulue yang merupakan Kepulauan menjadikan jalur perhubungan udara sebagai akses sekunder selain jalur perhubungan laut. Akan tetapi sarana dan prasara yang tersedia belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna fasilitas angkutan udara. Karena berdasarkan fakta yang ada sering terjadi antrian penumpang pengguna angkutan udara.
3. **Masih terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan darat.** Hal ini terlihat dari sarana transportasi darat antar kecamatan yang belum memadai, masih belum tersedianya fasilitas terminal angkutan barang, serta belum tersedianya halte di pusat-pusat kota kecamatan.

4.1.1.3 Infrastruktur Komunikasi dan Informasi

1. Pembangunan prasara dan sarana telekomunikasi yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten.
2. Pelayanan pos yang belum mampu menjangkau daerah-daerah yang terisolir, terutama di beberapa kecamatan dan daya jangkau telekomunikasi paling rendah.

4.1.1.4 Infrastruktur Sumber Daya Air

Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi khususnya sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Simeulue.

4.1.2 Perekonomian Daerah

4.1.2.1 Keuangan Daerah

Fakta dan Permasalahan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. **Penerimaan PAD Kabupaten Simeulue masih tergantung pada penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama, retribusi, makan minum dll.**
2. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan **penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil**. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Simeulue terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di Kabupaten Simeulue sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

4.1.2.2 Sumber daya Ekonomi

1. Masih belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) sehingga masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan.
2. Setiap tahun lahan-lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura ada yang beralih (konversi) ke subsektor lain seperti perkebunan sawit.
3. Rendahnya Produktifitas padi yang dihasilkan.
4. Terjadinya kesenjangan produktivitas karena belum optimalnya teknologi yang digunakan, ketersediaan dan kualitas air masih belum sesuai kebutuhan pertanian.
5. Masih tingginya desa rawan pangan di Kabupaten Simeulue.
6. Relatif masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan cukup tingginya angka kemiskinan nelayan.
7. Menyempitnya areal wilayah tangkapan yang dikuasai nelayan tradisional, karena peralatan/kapal dan teknologi yang dimiliki masih belum memadai.
8. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap permodalan sehingga pembudidaya ikan belum mencapai skala usaha.

9. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarinya.
10. Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianya coldstorage untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.
11. Masih ada oknum masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan terlarang seperti menggunakan tuba, bom, setrum dan bom serta adanya pencurian ikan di laut, baik oleh masyarakat dari daerah lain maupun oleh warga negara asing.
12. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep usaha kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan.
13. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan.
14. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah.
15. Rendahnya produktivitas dan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran; serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
16. Terbatasnya akses UMKM dan Koperasi kepada sumberdaya produktif.
17. Tertinggalnya kinerja koperasi dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang disebabkan antara lain karena rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.
18. Masih belum mampunya Kabupaten Simeulue dalam menarik minat investor dalam hal penanaman modal baik dalam maupun asing.
19. Rendahnya tingkat pemeliharaan tanaman baik pangan maupun perkebunan rakyat.

4.1.3 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Rendahnya nilai tambah sektor industri pengolahan berbasis komoditas unggulan.
2. Belum optimalnya perhatian pada perkebunan rakyat. Memberikan perhatian yang lebih besar pada sub sektor perkebunan, terutama perkebunan rakyat.

3. Jaminan penyediaan dan aksesibilitas masyarakat pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih).
4. **Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia profesional** dalam penguasaan teknologi dibidang perikanan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
5. Tantangan monokultur tanaman tertentu, berpeluang merubah keseimbangan alam dan perubahan ekosistem, berdampak pada bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

4.1.4 Sosial Budaya

4.1.4.1 Pendidikan

Permasalahan pokok pendidikan di Kabupaten Simeulue antara lain:

1. Masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah serta kesadaran masyarakat untuk bersekolah yang masih relatif rendah.
2. Belum optimalnya proses belajar mengajar sebagai akibat sarana dan prasarana seperti buku, alat-praktek, alat peraga dan alat-alat laboratorium yang belum memadai.
3. Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal.
4. Sistim Informasi Manajemen yang menyajikan data dan informasi belum berjalan dengan baik.
5. Belum mantapnya koordinasi antara dinas kabupaten/kota dengan dinas provinsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.
6. Distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional antar daerah maupun antara sekolah pada daerah yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bagi bidang ilmu tertentu.
7. Masih rendahnya serapan dunia usaha dan industri untuk menerima tenaga kerja tingkat menengah karena dianggap masih kurang terampil dan kurang profesional.

4.1.4.2 Kesehatan

Adapun permasalahan pokok yang dihadapi antara lain ;

1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh masyarakat.
2. Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah

3. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
5. Rendahnya kualitas sumber daya (tenaga) kesehatan.
6. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan.

4.1.4.3 Kebudayaan dan Pariwisata

Beberapa permasalahan bidang kebudayaan antara lain:

1. Besarnya potensi kepariwisataan di Kabupaten Simeulue belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana.
2. Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur.
3. Rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya nasional maupun budaya asing yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah.
4. Lemahnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam upaya menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai budaya, serta meningkatnya kegiatan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian kawasan budaya dan benda cagar budaya yang terkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah.
5. Kurangnya even-even kebudayaan yang dinamis, unik dan berkelas yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, serta mendukung peningkatan pembangunan pariwisata daerah.

4.1.4.5 Pemuda dan Olahraga

Permasalahan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:

1. Kurangnya minat pemuda baik sebagai individu maupun organisasi kepemudaan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam bidang kewirausahaan.
2. Kurangnya pengembangan budaya olah raga di kalangan masyarakat luas.
3. Terbatasnya media yang dapat memfasilitasi pemuda dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Keterbatasan ini muncul sebagai akibat dari keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga serta tingkat pendidikan pemuda yang masih relatif rendah.
4. Belum optimalnya peran swasta dalam menunjang prestasi olah raga daerah.
5. Semakin berkurangnya ruang publik guna meningkatkan akses layanan kepada masyarakat agar bisa berolahraga dengan baik dan terarah.

4.1.5. Tata Pemerintahan

4.1.5.1. Pemerintahan Umum

1. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan.

Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum tuntas dan terintegrasinya program Single Identification Number (SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan negara, terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan umum, bersama-sama dengan sector swasta dan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh **belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen keuangan negara dan pengawasannya**. Penyebabnya antara lain oleh keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering mendapatkan kritik dari masyarakat.

Di samping permasalahan tersebut di atas, **budaya kerja produktif juga belum berkembang secara maksimal di lingkungan birokrasi.** Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (code of conduct) masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang konflik kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan e-procurement belum dapat dilaksanakan.

Padahal, pengembangan dan penerapan e-procurement merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan jasa publik.

3. **Pelayanan Publik.** Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa pemerintah Kabupaten Simeulue **belum dapat menyediakan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi,** yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.

Sebagian besar unit pelayanan public belum menerapkan standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan keluhan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga penanganan pengaduan seperti "Ombudsman Daerah".

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan belum akuntabel. Proses

kerja di dalam birokrasi juga belum ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

- 4. Pengembangan budaya hukum dan HAM.** Meskipun upaya pengembangan budaya hukum dan HAM terus dilakukan secara sinergi antara pemerintah dan pemerintah provinsi, dan kabupaten/Kota di Kabupaten Simeulue, namun kesadaran hukum serta penghormatan terhadap HAM masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.

Di sisi lain upaya pendidikan Hukum dan HAM serta Koordinasi penegakan HAM skala Kabupaten, dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Hukum dan HAM yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap pemerintah masih belum berjalan optimal. Demikian juga dengan kinerja Panpel RANHAM provinsi dan kab/kota dalam Kabupaten Simeulue.

4.1.5.2. Politik

1. Tingginya angka partisipasi dalam pemilu ternyata tidak menjamin kualitas pemilu, baik pemilu Kepala Daerah maupun legislatif dan eksekutif. Bahkan ada kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat tentang pemilu. Ada anggapan yang keliru bahwa pemilu indentik dengan imbal jasa. Sehingga menimbulkan akses negatif terhadap berbagai kecurangan dalam pemilu. Khusus partisipasi politik perempuan, meskipun telah mengalami banyak kemajuan. Namun, kondisi ini belum mampu mengubah realitas rendahnya peran politik perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Kendala yang masih dihadapi adalah kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri. Kendala lainnya adalah terkait faktor eksternal, seperti budaya patriakal yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan, dan masih banyaknya dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki.

Selain itu, perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik, serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

2. Sampai saat ini partai politik belum menunjukkan kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai parpol, yaitu agregasi

dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik. Selain itu Parpol pun mengh

3. adapi beberapa persoalan internal organisasinya, seperti sarana dan prasarana penunjang organisasi, konflik internal dalam pergantian kepengurusan, belum berjalan optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik menjadi berkurang.
4. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya. Di sisi lain kondisi saat ini mengindikasikan industri media yang berkembang masih didominasi oleh kepentingan profit/industri yang dikhawatirkan mengganggu kebebasan pers.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Simeulue dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

1. Ketersediaan dan kualitas **infrastruktur fisik** yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
2. Rendahnya **kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan daerah.**
3. Adanya **kesenjangan ekonomi ditandai tingginya** angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin
4. **Iklim investasi** yang belum kondusif **yang mendukung** pengembangan ekonomi daerah.
5. Penataan **Tata Pemerintahan** yang baik.

6. **Pemanfaatan sumberdaya alam** yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
7. **Kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi sesuai perkiraan** banyaknya bencana alam (gempa bumi) yang terjadi, berdampak signifikan pada fasilitas infrastruktur.
8. **Permasalahan klasik bagi wilayah-wilayah berkembang adalah pemenuhan infrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi, listrik, dan air** untuk masyarakat luas yang merupakan tujuan pembangunan yang harus dicapai. Isu ini menjadi sangat penting karena pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi prasyarat utama berjalannya proses pembangunan secara baik, tidak terkecuali Kabupaten Simeulue. Adalah suatu kemustahilan pembangunan akan berjalan dengan baik jika infrastruktur transportasi tidak memadai, listrik dan air tidak tersedia.
9. Isu strategis lainnya yang langsung berkaitan dengan Kabupaten Simeulue adalah **perlu penyediaan ruang dan tempat usaha yang layak, nyaman, aman dan memadai**. Beberapa permasalahan dapat diidentifikasi diantaranya:
 - a. Tingkat kemiskinan cukup tinggi (tahun 2010) sekitar 23,63 % dari total penduduk atau berjumlah 84.704 jiwa.
 - b. Rendahnya kualitas tenaga kerja (2011), hal ini dapat dilihat dari rasio penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi (DIV/S1) dengan total penduduk, rasionya adalah 9,98 persen dari 86.190 total jumlah penduduk.
 - c. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (tahun 2011), hal ini tercermin dari tingkat pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Simeulue yang berusia 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan S1 sebesar 2,77% dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun, Diploma sebesar 3,90%, SLTA sebesar 18,75% dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun dan yang belum tamat SD/MI sebesar 19,33% dari total jumlah penduduk usia ≥ 10 Tahun.
 - d. Masih tingginya angka kematian bayi (2011), yaitu sebesar 41/1000 kelahiran hidup ini berarti dari 1369 jumlah kelahiran terdapat 55 jumlah kematian bayi.
 - e. Masih belum memadainya layanan kesehatan masyarakat (tahun 2011), hal ini tercermin dari persentasi jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Jumlah dokter sebesar 0,22.
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan (perikanan tangkap baru dimanfaatkan sekitar 50% dari potensi lestariannya, potensi budidaya rumput laut di pantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan 60%.

- g. Belum berkembangnya potensi pariwisata berbasis sejarah, pantai dan alam. Destinasi Pariwisata (78 objek/kawasan wisata yang terdiri dari wisata pantai 33 objek/kawasan , wisata sejarah 8 objek, wisata alam 37 kawasan).
- h. Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukung percepatan pembangunan (jalan, jembatan,terminal, irigasi, drainase, instalasi air bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana).
- i. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- j. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah (sarana dan prasarana perkantoran, mobilitas, pelayanan publik, regulasi).
- k. Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM aparatur (tahun 2012) sekitar 29,80% berpendidikan strata 1 (S-1) serta strata 2/ strata 3 (S2/S3) sebesar 0,60%.
- l. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
- m. Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan dan Pandeglang sebagai kawasan pendidikan, pariwisata dan budidaya pertanian serta kegiatan pendukungnya.